

---

**DAMPAK HIBAH UANG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI****Oleh****Made Kembar Sri Budhi<sup>1)</sup>, Ni Putu Nina Eka Lestari<sup>2)</sup> & Ni Nyoman Reni Suasih<sup>3)</sup>**<sup>1,3</sup>**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana****Jl. P.B. Sudirman Denpasar**<sup>2</sup>**Universitas Pendidikan Nasional****Jl. Bedugul No. 39 Denpasar****Email: <sup>1</sup>[kadek\\_dedek@unud.ac.id](mailto:kadek_dedek@unud.ac.id), <sup>2</sup>[ninajegeg@gmail.com](mailto:ninajegeg@gmail.com), <sup>3</sup>[renisuasih@unud.ac.id](mailto:renisuasih@unud.ac.id)****Abstrak**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah berkaitan dengan nilai tambah produksi, peningkatan produktivitas dan proses bisnis pada peningkatan hasil merupakan kunci dalam proses untuk pertumbuhan ekonomi. Kebijakan dengan sasaran tertentu akan membantu untuk memfokuskan kebijakan pada faktor-faktor yang meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kebijakan Pemerintah memberikan bantuan modal/uang berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang nantinya akan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan menjawab sejauhmana manfaat dari bantuan modal tersebut terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Badung. Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam upaya mengetahui dampak pemberian hibah uang terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Badung. Hasil kajian ini sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan realisasi hibah uang di Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemberian hibah uang di Kabupaten Badung telah mampu meningkatkan keterampilan masyarakat melalui sarana pendidikan (informal), serta meningkatkan interaksi sosial melalui kegiatan gotong-royong; (2) Secara umum, hibah uang di Kabupaten Badung telah berdampak positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Badung; dan (3) Adanya pemberian hibah uang oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah mampu menghemat biaya yang seharusnya menjadi pengeluaran masyarakat.

**Kata Kunci: Peran Hibah Uang, Pemberdayaan Masyarakat****PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pembangunan di negara maju maupun berkembang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Secara umum pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) riil selama periode waktu tertentu. Arti lain secara umum adalah peningkatan pendapatan per kapita yang mengarah ke standar hidup yang lebih baik (Bishop *et al.*, 2011). Adelman dalam Arsyad (2010) mengidentifikasi paling tidak ada tiga faktor utama yang mendorong terjadinya

perubahan teori dan paradigma pembangunan ekonomi dari masa ke masa, yaitu (1) Adanya perubahan ideologi; (2) Adanya Revolusi dan inovasi teknologi; dan (3) Adanya perubahan lingkungan internasional. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan nilai tambah produksi, peningkatan produktivitas dan proses bisnis pada peningkatan hasil merupakan kunci dalam proses untuk pertumbuhan ekonomi. Kebijakan dengan sasaran tertentu akan membantu untuk memfokuskan kebijakan pada faktor-faktor yang meningkatkan tingkat

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peran modal fisik berupa tenaga kerja lebih produktif ketika mereka memiliki alat yang mereka miliki. Dengan kata lain betapa pentingnya alat untuk dapat menaikkan produktivitas. Perlu dan harus ada kebijakan yang memberikan insentif untuk berinvestasi dalam modal fisik.

Masalah budaya, norma dan keyakinan yang mencirikan sebuah komunitas merupakan bagian dari modal manusia di mana individu memiliki dan ditransmisikan kepada semua anggota masyarakat. Faktor-faktor sosial dapat mempengaruhi tingkat pendidikan karena mereka memodifikasi dan sebagai intensif untuk mendapatkan pengetahuan baru (Carrillo, 2002). Faktor-faktor sosial mempengaruhi akumulasi modal manusia hanya secara tidak langsung karena mereka merupakan faktor produktif dalam fungsi produksi agregat yang saling melengkapi atau pengganti modal manusia (Glaser, 2001 dalam Carrillo *et al.*, 2004).

Kebijakan Pemerintah memberikan bantuan modal/uang berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang nantinya akan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan menjawab sejauhmana manfaat dari bantuan modal tersebut terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Badung.

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, maupun badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Dalam pemberian hibah peruntukannya telah ditetapkan, dan bersifat tidak wajib. Pemberian hibah juga harus memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (3)). Pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hibah disesuaikan kepada kemampuan keuangan daerahnya sendiri dan harus tetap memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib terlebih dahulu (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)).

Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam upaya mengetahui dampak pemberian hibah uang terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Badung. Hasil kajian ini sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan realisasi hibah uang di Kabupaten Badung.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat sering diidentikkan dengan istilah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang kehidupan, seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial (Dunham dalam Sutiarso *et al.*, 2004). Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, dan kesatuan penduduk yang lebih luas (Panggayuh, 2014).

Kesejahteraan sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya.

Kebutuhan masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik, yang sering disebut kebutuhan sosial atau kultural (Cole dalam Sosiawan, 2003). Menurut Nasikun dalam Bungkaes *et al.* (2013), konsep kesejahteraan merupakan padanan dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari indikator: (1) rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*). Karakteristik dari negara kesejahteraan yaitu individualisme dan kolektivisme (Marshall dalam Bungkaes *et al.*, 2013).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya berkaitan dengan kebutuhan pokok (*primary/basic needs*), kemudian pendidikan, kesehatan dan gizi, lingkungan, serta partisipasi sosial.

#### **Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat**

Pusat Statistik Indonesia (2018) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: (1) Tingkat pendapatan keluarga; (2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; (3) Tingkat pendidikan keluarga; (4) Tingkat kesehatan keluarga; dan (5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kolle (dalam Bungkaes *et al.*, 2013), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan: 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya; 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya; 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti

moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Menurut Drewnoski (1974) dalam Bungkaes *et al.* (2013), melihat konsep kesejahteraan dari tiga aspek, yaitu (1) dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (*somatic status*), seperti nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagainya; (2) dengan melihat pada tingkat mentalnya (*mental/educational status*) seperti pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya; (3) dengan melihat pada integrasi dan kedudukan social (*social status*).

Tingkat kesejahteraan atau taraf hidup diukur dari tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok/dasar manusia (*basic needs*). Beberapa komponen yang termasuk dalam kebutuhan dasar/pokok ini meliputi: (1) makanan, nutrisi, lapangan kerja, (2) kesehatan, (3) perumahan, (4) pendidikan, (5) komunikasi, (6) kebudayaan, (7) penelitian dan teknologi, (8) energi, (9) hukum, (10) dinamika politik dan implikasi ideologi (Soedjatmiko, 1998). Kemudian konferensi International Labor Organization (ILO) di Geneva Tahun 1976, dikemukakan konsep kebutuhan pokok/dasar mencakup 2 (dua) hal, yaitu: (1) konsumsi minimum untuk keluarga, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, dan (2) pelayanan negara (*public services*) untuk masyarakat pada umumnya, seperti air bersih, transportasi, listrik, dan sebagainya (Tjokrowinoto, 2007).

Selanjutnya, konsep pengukuran kesejahteraan yang paling umum digunakan ialah konsep *Human Development Index* atau HDI. Konsep HDI diperkenalkan dan dikembangkan sejak tahun 1985 (Miles, dalam Moeljarto dan Prabowo, 1997). Meskipun dari tahun ke tahun HDI mendapat penekanan yang berbeda, tetapi intinya HDI mengidentifikasi kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu dalam masyarakat untuk dapat berpartisipasi di masyarakat. *Human Development Index* (HDI) ini mempunyai tiga komponen yang menunjukkan tingkat

kesejahteraan (kemakmuran), yaitu: (1) angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*), jadi menyangkut kesehatan; (2) tingkat pendidikan (*educational attainment*), dan (3) tingkat pendapatan (*income*) atau kemampuan daya beli masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini melakukan pengumpulan data yang bersumber dari wawancara dan observasi.

Obyek penelitian ini adalah desa adat (pakraman) dan kelompok masyarakat di Kabupaten Badung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung (*in-depth interview*), *focus group discussion*, observasi, teknik dokumenter, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Pemberian Hibah Uang Tunai Bagi Kesejahteraan Masyarakat Badung

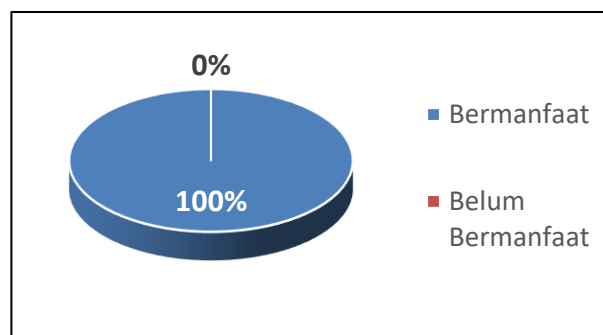
Apabila ditinjau dari indikator kesejahteraan masyarakat maupun kesejahteraan sosial, maka dampak hibah berupa uang tunai bagi kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau dari kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial-psikologis, kebutuhan perkembangan, dan memberi sumbangan atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

#### 1) Dampak Hibah Uang Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Hibah uang di Kabupaten Badung diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, interaksi sosial, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan kerja. Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan bahwa 100 persen responden menyatakan bahwa hibah uang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, baik formal maupun

informal. Dalam hal ini lebih banyak mengarah pada pendidikan informal di luar sekolah. Pendidikan informal ini sifatnya adalah untuk pengembangan keterampilan atau keahlian masyarakat. Seperti contohnya hibah uang tunai bagi sanggar seni, yang dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan tari, menyiapkan tempat latihan, honor pelatih, serta perangkat gamelan. Keterampilan tersebut tentu sangat bermanfaat di dalam meningkatkan kompetensi masyarakat, serta menambah peluang untuk memperoleh atau menciptakan lapangan kerja.

**Gambar 1. Persepsi Responden Tentang Dampak Hibah Uang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pendidikan**

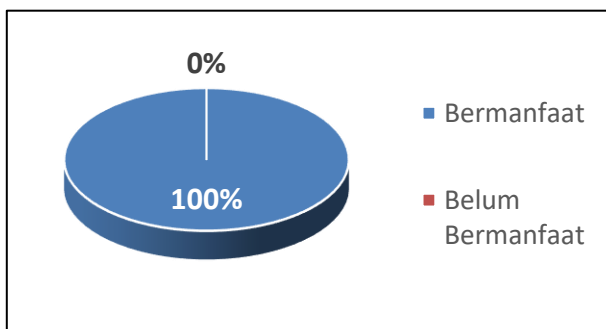


Sumber: Hasil pengolahan data

Dampak pemberian hibah uang dikatakan sangat bermanfaat untuk pendidikan di masyarakat. Dengan adanya hibah untuk perbanguan Pura dan Bale Banjar sehingga bisa memberikan tempat atau sarana untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, terutama pendidikan terkait dengan mental dan moral termasuk pendidikan di bidang rohani.

Seluruh responden (100 persen) berpendapat bahwa bahwa pemberian hibah uang sangat bermanfaat untuk peningkatan kebersamaan interaksi sosial seperti gotong royong dan pemanfaatan fungsi Bale Banjar semakin maksimal, untuk kegiatan seni, budaya dan olah raga bersama sehingga dapat meningkatkan interaksi sosial baik dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat desa (Gambar 2).

**Gambar 2. Persepsi Responden Tentang Dampak Hibah Uang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Interaksi Sosial Kebersamaan**

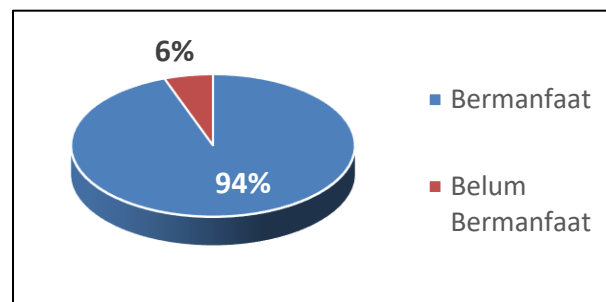


Sumber: Hasil pengolahan data

Tujuan hibah uang selain mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, juga untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong-royong. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hibah uang sebagian besar dipergunakan untuk pembangunan pura/bale banjar. Memang Pemerintah Kabupaten Badung tidak memberikan hibah sejumlah RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang diajukan oleh masyarakat, tujuannya selain untuk pemerataan adalah untuk merangsang pemberdayaan masyarakat agar ikut terlibat (baik secara material maupun tenaga) dalam pembangunan pura/bale banjar.

Terkait dampak hibah uang terhadap ekonomi masyarakat pada level keluarga, sebagaimana digambarkan pada Gambar 3 berikut. Berdasarkan Gambar 3, menunjukkan bahwa 94 persen responden berpendapat bahwa hibah uang di Kabupaten Badung telah mampu membantu kondisi masyarakat pada tingkat keluarga, sedangkan hanya 6 persen responden yang berpendapat bahwa hibah uang belum berdampak pada kondisi keluarga. Dengan menerima hibah uang, maka pengeluaran masyarakat (pada tingkat keluarga) untuk iuran dalam pembangunan (seperti pembangunan pura atau bale banjar) mengalami penurunan, sehingga dapat dialokasikan untuk hal lain.

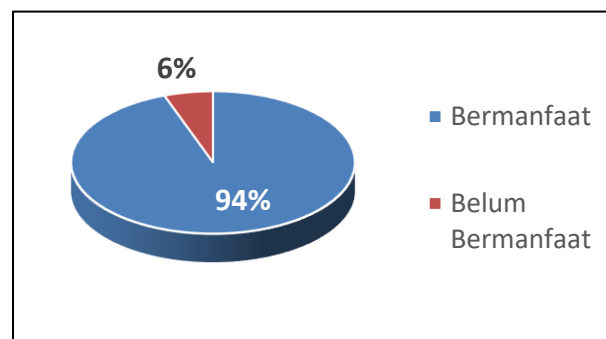
**Gambar 3. Persepsi Responden Tentang Dampak Hibah Uang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat pada Tingkat Keluarga**



Sumber: Hasil pengolahan data

Responden juga berpendapat bahwa hibah uang berdampak terhadap lingkungan kerja, dengan persepsi sebagaimana Gambar 4.

**Gambar 4. Persepsi Responden Tentang Dampak Hibah Uang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peluang Kerja Masyarakat**



Sumber: Hasil pengolahan data

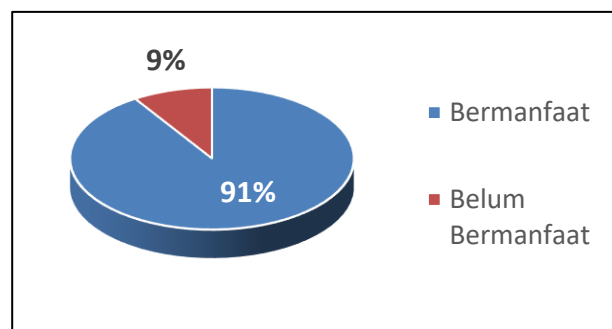
Sebanyak 94 persen responden berpendapat bahwa hibah uang bermanfaat bagi lingkungan kerja, sedangkan 6 persen responden menganggap bahwa hibah uang belum bermanfaat bagi peluang kerja masyarakat setempat.

## 2) Dampak Hibah Uang Untuk Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Hibah uang di Kabupaten Badung juga berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, baik untuk peningkatan produksi, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan akses pasar.

Pemerintah Kabupaten Badung juga memberikan hibah uang yang bertujuan untuk meningkatkan produksi.

**Gambar 5. Persepsi Responden Tentang Dampak Hibah Uang Terhadap Peningkatan Produksi**



Sumber: Hasil pengolahan data

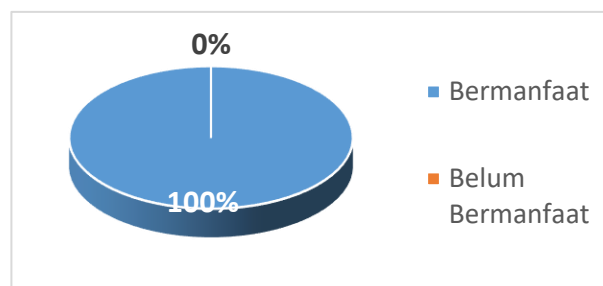
Berdasarkan Gambar 5, menunjukkan bahwa 91 persen responden menilai bahwa hibah uang membuat peningkatan produksi, sedangkan hanya 9 persen yang berpendapat bahwa hibah uang belum mampu meningkatkan produksi.

Pemberian hibah uang terhadap peningkatan produksi masyarakat terlihat dari meningkatnya jumlah produksi para pengusaha kecil di desa, seperti yang dirasakan oleh kelompok ternak babi. Pemberian hibah uang mampu meningkatkan jumlah ternak warga dari rata-rata 4 ekor menjadi 20 ekor, demikian juga pada kelompok nelayan dan kelompok perajin. Hal ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi di masyarakat karena hibah yang diberikan dipakai sebagai bantuan modal usaha, sehingga mendorong para pengusaha di desa untuk memperluas usahanya, yang mana hal ini akan mendorong peningkatan jumlah produksi.

Persepsi responden mengenai dampak hibah bagi kesempatan kerja, hibah uang tunai dianggap dapat meningkatkan kesempatan kerja dan keterampilan oleh seluruh responden (100 persen). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa seluruh responden menganggap hibah uang mampu meningkatkan pemberdayaan di bidang pendidikan. Utamanya pendidikan informal yang akan memberikan

peningkatan keterampilan dan kompetensi. Hal tersebut merupakan modal utama dalam memperoleh atau menciptakan peluang kerja.

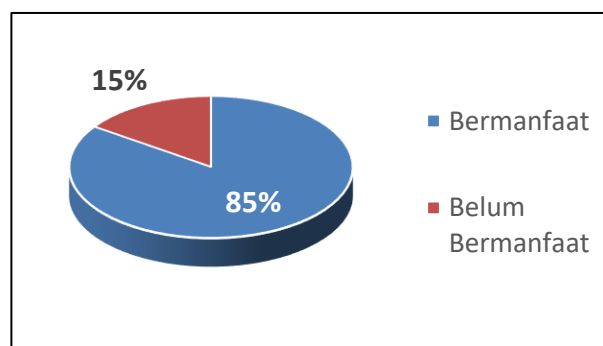
**Gambar 6. Persepsi Responden Tentang Dampak Hibah Uang Terhadap Kesempatan Kerja dan Keterampilan**



Sumber: Hasil pengolahan data

Dampak hibah uang terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, diketahui bahwa sebagian besar responden, yaitu 85 persen berpendapat bahwa hibah yang diberikan telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, sedangkan hanya 15 persen yang berpendapat bahwa hibah tersebut belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya bantuan hibah uang terutama bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Badung mampu meningkatkan produksi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka.

**Gambar 7. Persepsi Responden Tentang Dampak Hibah Uang Terhadap Peningkatan Pendapatan**



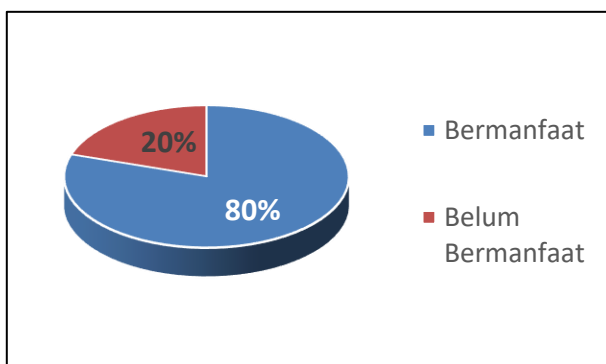
Sumber: Hasil pengolahan data

Pemberian hibah untuk pembangunan fisik seperti perbaikan Bale Banjar, perbaikan pura juga bertampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat desa, karena banyak

menggunakan tenaga tukang dan kepala tukang dari dalam desa. Responden yang menyatakan tidak mengalami peningkatan pendapatan karena kegiatannya murni sosial, tidak memunggut pembayaran kepada anggota sanggar.

Selain berdampak pada produksi, perlu dikaji juga persepsi dampak hibah uang bagi akses pasar. Berdasarkan gambar 8, dapat dilihat bahwa sebanyak 80 persen responden berpendapat bahwa hibah uang berpengaruh positif terhadap akses pasar, sedangkan hanya 20 persen responden yang menganggap hibah uang belum berdampak bagi peningkatan akses pasar.

**Gambar 8. Persepsi Responden Tentang Dampak Hibah Uang Terhadap Akses Pasar**



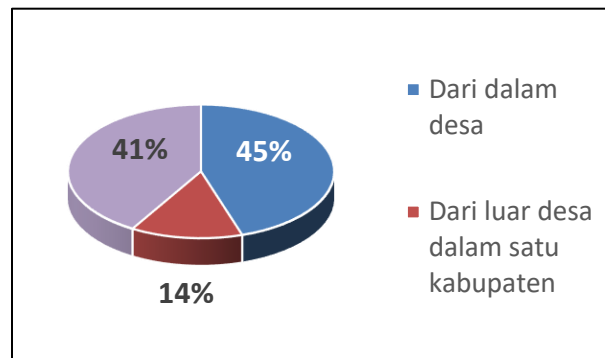
Sumber: Hasil pengolahan data

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hibah uang sebagian besar digunakan untuk pembangunan bale banjar, sehingga perlu dianalisis pula mengenai asal bahan baku serta tenaga kerja yang digunakan untuk pembangunan.

Berdasarkan Gambar 9, menunjukkan bahwa 45 persen bahan baku dibeli dari dalam desa, sedangkan hanya 14 persen yang diperoleh dari luar desa dan masih di wilayah Kabupaten Badung. Namun sisanya 41 persen bahan baku diperoleh dari luar Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian hibah uang berdampak positif bila dilihat dari sumber pembelian bahan baku yang lebih dari 50 persen berasal dari Kabupaten Badung (45 persen berasal dari desa setempat,

dan 14 persen berasal dari luar desa setempat namun masih di Kabupaten Badung).

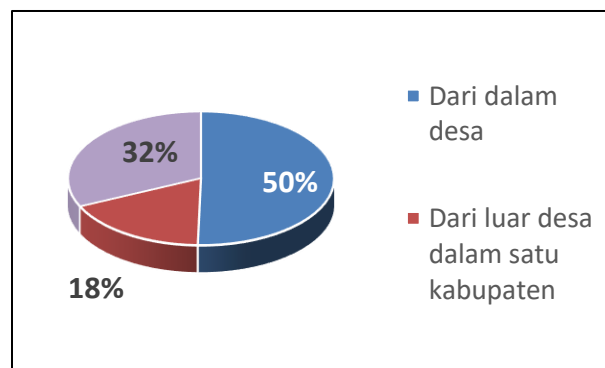
**Gambar 9. Persentase Sumber Bahan Baku Pembangunan Fisik yang Berasal dari Hibah Uang**



Sumber: Hasil pengolahan data

Terkait penggunaan tenaga kerja, diketahui bahwa dominan tenaga kerja untuk pembangunan tersebut, yaitu sebanyak 50 persen berasal dari dalam desa, sebanyak 32 persen berasal dari sebanyak 18 persen dari luar namun masih di wilayah Kabupaten Badung.

**Gambar 10. Persentase Asal Tenaga Kerja Untuk Pembangunan Fisik yang Berasal dari Hibah Uang**



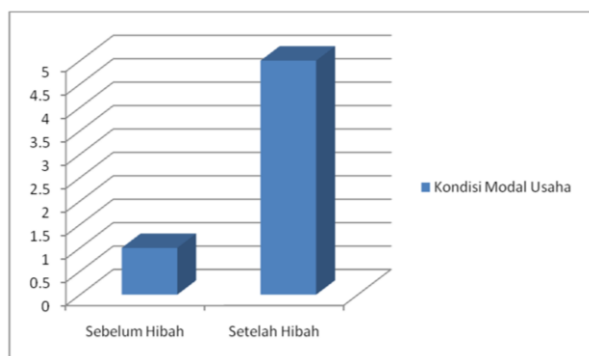
Sumber: Hasil pengolahan data

Hal ini berarti pemberian hibah uang berdampak positif karena lebih dari 50 persen tenaga kerja untuk pengerjaan pembangunan yang berasal dari dana hibah merupakan tenaga kerja desa setempat, atau desa luar yang masih berada di Kabupaten Badung. Adanya pemberian hibah untuk pembangunan fisik, seperti perbaikan Bale Banjar, perbaikan pura juga bertampak kepada peningkatan

pendapatan masyarakat desa, karena banyak menggunakan tenaga tukang dan kepala tukang dari dalam desa.

Dampak hibah uang terhadap bantuan modal usaha masyarakat, dapat dijelaskan bahwa hibah uang telah berdampak positif bagi modal usaha para peternak di wilayah Kabupaten Badung.

**Gambar 11. Kondisi Modal Usaha Bagi Peternak/Nelayan/Pengrajin Sebelum dan Setelah Menerima Hibah Uang**

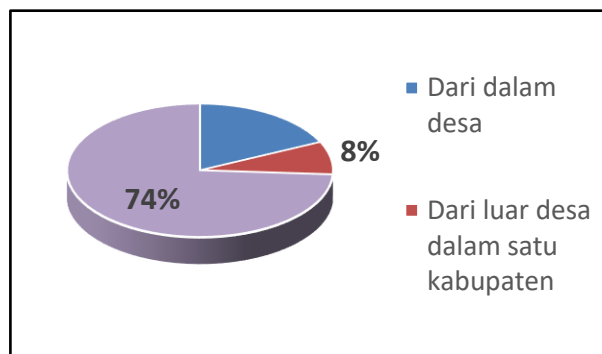


Sumber: Hasil pengolahan data

Gambar 11 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kondisi modal usaha bagi peternak/nelayan/pengrajin setelah mendapatkan hibah uang. Peningkatan tersebut bahkan mencapai lima kali lipat, dan sangat bermanfaat bagi keberlanjutan usaha, bahkan mampu meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari usaha.

Terdapat juga hibah uang yang diberikan bagi sanggar seni untuk pembelian sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan berkesenian. Adapun sarana yang dibeli antara lain alat gamelan, pakaian tari, dan pengadaan tempat latihan. Berdasarkan Gambar 12, diketahui bahwa hanya 18 persen alat-alat kesenian tersebut yang dibeli dari dalam desa, dan sebanyak 8 persen dibeli wilayah Kabupaten Badung, sedangkan sisanya sebanyak 74 persen dibeli dari kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Hal ini terjadi karena jumlah pengrajin yang menyediakan alat-alat kesenian di Kabupaten Badung masih terbatas.

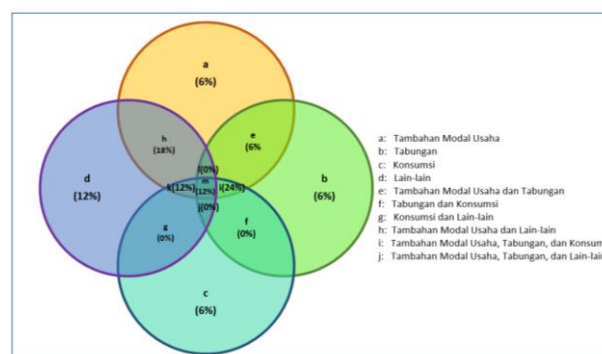
**Gambar 12. Persentase Asal Pembelian Alat Kesenian yang Berasal dari Hibah Uang**



Sumber: Hasil pengolahan data

Pemerintah Kabupaten Badung saat ini telah banyak memberikan subsidi maupun program gratis, seperti dana kesehatan, pendidikan, dan upacara adat/agama, maka biaya yang seharusnya menjadi pengeluaran masyarakat dapat dihemat. Selanjutnya atas biaya tersebut antara lain digunakan untuk tambahan modal usaha, tabungan, konsumsi, biaya pendidikan dan kesehatan, serta biaya kegiatan sosial dan adat.

**Gambar 13. Persentase Penggunaan Pengeluaran Masyarakat yang Dapat Dihemat Sebagai Dampak Perolehan Hibah Uang**



Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan Gambar 13, menunjukkan bahwa biaya yang dapat dihemat tersebut, sebagian besar digunakan untuk tambahan modal usaha, tabungan dan konsumsi sebanyak 24 persen. Hal ini merupakan langkah positif untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat.

**PENUTUP****Kesimpulan**

- 1) Dampak hibah uang terhadap pemberdayaan masyarakat Badung  
Pemberian hibah uang di Kabupaten Badung telah mampu meningkatkan keterampilan masyarakat melalui sarana pendidikan (informal), serta meningkatkan interaksi sosial melalui kegiatan gotong-royong.
- 2) Dampak hibah uang terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Badung  
Secara umum, hibah uang di Kabupaten Badung telah berdampak positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Badung. Ini terbukti dari adanya peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, peningkatan akses pasar, serta mengurangi pengeluaran masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung.
- 3) Adanya pemberian hibah uang oleh Pemerintah Kabupaten Badung telah mampu menghemat biaya yang seharusnya menjadi pengeluaran masyarakat. Penghematan biaya tersebut digunakan oleh masyarakat untuk tambahan modal usaha, tabungan, konsumsi, dan biaya pendidikan serta kesehatan.

**Saran**

- 1) Hibah uang perlu diarahkan juga untuk pengembangan sentra industri di masyarakat, sehingga dampaknya lebih berkesinambungan, dapat membuka lapangan kerja yang berkelanjutan, serta mampu memberdayakan masyarakat yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
- 2) Adanya pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Badung di dalam mengarahkan dan mengontrol penggunaan dana hibah di masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Bishop, S., R. Miller, C., Parrott, C. Martie, 2011, *The Paperback of the Kaplan AP Macroeconomics/ Microeconomics*, Kaplan Publishing, New York.
- [2] Arsyad, Lincolin, 2010, *Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta.
- [3] Carrillo, Maria Rosaria, 2002, Human capital formation in the new growth theory: the role of 'social factors', *The Theory of Economic Growth: a 'Classical' Perspective*, p:186-204.
- [4] Glaser, B. G., 2001, *The grounded theory perspective: Conceptualization contrasted with description*, Sociology Press, Mill Valley, CA.
- [5] Carrillo, P., Robinson, H., Al-Ghassani, A., Anumba, C., 2004, Knowledge management in UK construction: Strategies, resources and barriers, *Project Management Journal*, 35, (1), p. 46.
- [6] Sutiarso, I., Warella, S. Sulandari, 2004, Implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PKK) di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- [7] Panggayuh, S., 2014, Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- [8] Sosiawan, H. P., 2003, Telaah Tentang Peran Negara Dalam Kesejahteraan Sosial, *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.

- 
- [9] Bungkaes, H. R., J. H. Posumah, B. Kiyai, 2013, Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Manahan Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Acta Diurna*.
- [10] Badan Pusat Statistik, 2018, *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017*, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jakarta.
- [11] Tjokrowinoto, M., 2007, *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [12] Moeljarto, V. dan S. Prabowo, 1997, Bidang Pendidikan dan Kesehatan Dalam Pembangunan Sosial. *Jurnal CSIS*, Tahun XXVI, No. 1, Januari-Februari 1997, CSIS, Jakarta.